

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang–Undang Dasar 1945. Membahas hukum tidak akan lepas dari manusia, karena hukum berperan sangat penting dalam kehidupan manusia yaitu sebagai alat yang mengatur tingkah laku setiap orang dalam bermasyarakat. Hukum adalah himpunan peraturan–peraturan (perintah–perintah dan larangan–larangan) yang mengurus tata–tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹ Dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan tiap individu mengenai hak dan kewajiban secara umum atau pribadi mendapatkan perlindungan hukum. Pengaturan hukum di Indonesia berlaku dua jenis, yaitu hukum publik dan hukum privat. Salah satu hukum yang diatur menurut hukum publik yaitu hukum pidana, sedangkan hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat.

Perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata terletak pada sifat berlakunya, hukum pidana sifatnya berlaku umum dan hukum perdata bersifat khusus. Maksudnya ketentuan yang diatur dalam hukum pidana mengatur perilaku individu dalam kehidupan di masyarakat, sedangkan hukum perdata berisi ketentuan yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lain.

¹ E. Utrecht, didalam buku C. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Zen Abdullah yang dimaksud hukum perdata adalah segala ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dan atau antara orang dengan badan hukum, dan atau badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain.³

Salah satu contoh perbuatan hukum yang diatur menurut hukum perdata yaitu Perjanjian. Demi memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya, manusia sering melakukan perbuatan hukum antara individu yang satu dengan individu yang lain. Perbuatan hukum tersebut berupa kesepakatan terhadap suatu obyek yang ditentukan oleh kedua pihak. Perjanjian merupakan perbuatan yang sering dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, tolong-menolong, dan bekerjasama. Pengertian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata yaitu, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

²Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

³M. Zen Abdullah, 2009, *Intisari Hukum Perdata Materil*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, hlm.3.

Obyek perjanjian itu berupa suatu janji yang harus dipenuhi dan ditentukan oleh pihak-pihak yang bersepakat, dan janji tersebut merupakan prestasi pada perjanjian. Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, wujudnya dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu.⁴ Ingkar janji atau tidak dipenuhinya prestasi itu disebut wanprestasi.

Selain perbuatan hukum perdata, sering pula terjadi perbuatan hukum pidana dalam kehidupan masyarakat yaitu penipuan. Penipuan adalah salah satu perbuatan hukum pidana yang diatur pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yang berisi bahwa barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Alasan utama seseorang menipu yaitu memperoleh kekayaan materi untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi dengan cara yang salah.

Penipuan dan Perjanjian adalah dua contoh perbuatan hukum yang diatur dalam dua jenis hukum berbeda. Oleh karena itu penegakan hukum untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat kedua perbuatan tersebut melalui sistem peradilan yang berbeda. Ketika terjadi wanprestasi pada perjanjian yang telah dibuat oleh dua pihak, atau tidak dipenuhinya prestasi maka pihak yang

⁴ FX. Suhardana, 2009, *Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 12.

dirugikan dapat menuntut ganti kerugian melalui sistem peradilan perdata. Namun tidak jarang masyarakat melaporkan kerugian tersebut ke polisi yang berwenang dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman masyarakat atas perbedaan sistem peradilan yang dapat menyelesaikan masalah mereka. Pada dasarnya aparat penegak hukum memiliki keahlian pada pemahaman atas kedua sistem peradilan yang ada di Indonesia tersebut.

Pada dasarnya kasus wanprestasi hanya dapat diselesaikan melalui peradilan perdata. Namun kenyataannya ada penegak hukum di daerah yang menyelesaikan kasus wanprestasi melalui peradilan pidana, seperti perbuatan hukum yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Perbuatan tersebut adalah perjanjian yang berawal dari salah satu pihak seorang wiraswasta meminjam uang kepada pihak lain yang merupakan kerabatnya sejumlah Rp 105.250.000,- (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Peminjaman uang tersebut dilakukan secara bertahap sejak tahun 1999 hingga tahun 2004, dalam perjanjian utang-piutang itu pihak berutang memberikan jaminan Bilyet Giro sebanyak 10 lembar. Dari 10 lembar Bilyet Giro tersebut, hanya 4 lembar saja yang dapat dicairkan oleh pihak berpiutang dengan total nilai Rp 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bilyet Giro lainnya yang tersisa 6 lembar sejumlah Rp 56.750.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dicairkan pada saat jatuh tempo atau pada batas waktu yang disepakati, alasannya karena si berutang belum mempunyai dana. Pihak berutang meminta untuk mengundurkan jatuh tempo selama 1 bulan, penundaan pencairan itu dituangkan dalam 1 lembar kertas

dengan tulisan tangan. Namun setelah 1 bulan dari janji yang diminta oleh berutang tidak terealisasi dan tidak ada penyelesaian yang nyata hingga pihak berpiutang melaporkannya kepada kepolisian wilayah Malang dengan tuduhan penipuan.

Laporan tersebut diproses dan diadili pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan tuntutan oleh jaksa penuntut umum tanggal 14 Desember 2004, yaitu menyatakan bahwa si berutang bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP, dan menuntut pidana penjara selama 2 tahun. Barang bukti yang diberikan oleh jaksa berupa 8 lembar bilyet giro, 3 lembar surat keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran giral, 1 lembar kertas berisi tulisan tangan penundaan pencairan bilyet giro, 43 lembar bukti setoran, buku arisan yang dananya dipinjam oleh si berutang dari si berpiutang. Berdasarkan barang bukti tersebut oleh Hakim Pengadilan Negeri di Kepanjen pada Putusan No. 565/Pid.B/2004/PN.Kpj tanggal 11 Oktober 2005 menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan terhadap pihak berutang karena telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Pengajuan Banding dari kuasa hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan No.59/Pid./2005/PT.Sby tanggal 03 April 2006 menyatakan dalam putusan yaitu menguatkan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen. Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung No.1294 K/Pid/2007 pada tingkat Kasasi. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi

Pemohon Kasasi yaitu pihak yang berutang dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen.

Pertimbangan hakim dalam putusan tingkat kasasi tersebut menyatakan bahwa perbuatan hukum yang terjadi antara terdakwa dan pelapor berawal dari perjanjian utang-piutang. Dari 10 lembar Bilyet Giro yang diberikan, hanya 4 lembar dapat dicairkan yang totalnya belum memenuhi jumlah dari utang terdakwa. Artinya terdakwa belum melunasi sisa utangnya, dengan demikian ia telah melakukan ingkar janji/belum melaksanakan kewajibannya (Wanprestasi). Berdasarkan uraian tersebut sebenarnya kasus ini termasuk lingkup keperdataan yang harus diselesaikan melalui peradilan perdata bukan peradilan pidana.

Menurut Pasal 1328 KUHPerdata bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Hal ini berarti suatu perjanjian dapat dibatalkan dengan alasan penipuan, namun suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana jika perbuatan tersebut mengandung unsur, atau syarat yang menjadi ciri dari perbuatan yang dilarang itu. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).⁵

⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 64.

Pembuktian adanya unsur penipuan dalam kasus ini melalui beberapa barang bukti yang berbentuk surat-surat. Permasalahan yang timbul yaitu alasan penegak hukum menerapkan sanksi pidana penipuan pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Karena perbedaan pertimbangan antara pengadilan tingkat pertama dan kedua dengan Mahkamah Agung pada penyelesaian perkara ini, sehingga menunjukkan adanya gejala sosial oleh aparat penegak keadilan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶

Penegak Hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menerapkan hukum, karena melalui penegak hukum dapat ditegakkannya keadilan. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus berwawasan luas untuk menerapkan hukum yang tepat, bijaksana untuk menjadi teladan bagi masyarakat, dan moralitas yang tinggi untuk menegakan keadilan. Aparat penegak hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa, dan Hakim memiliki fungsi, tugas dan wewenang masing-masing yang berbeda namun dengan tujuan yang sama yaitu menegakan hukum atas gejala sosial yang timbul pada masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan dalam menerapkan hukum untuk menyelesaikan perkara yang ada dan tidak mencederai rasa keadilan.

⁶ Jimly Asshiddiqie, (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia) *Penegakan Hukum* diakses dari <http://www.docudesk.com> pada 18 Oktober 2011 pukul 12:30AM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu Apakah dasar pertimbangan penegak hukum menerapkan Pasal 378 KUHP dalam kasus wanprestasi tentang perjanjian utang piutang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan penegak hukum menerapkan Pasal 378 KUHP dalam kasus wanprestasi tentang perjanjian utang piutang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis, yaitu bagi ilmu pengetahuan. Memberikan manfaat mengenai perkembangan ilmu hukum yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada proses peradilan dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang terjadi pada masyarakat, agar terwujudnya peradilan yang lebih baik di Indonesia.
2. Manfaat Praktis, yaitu memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait:
 - a. Manfaat bagi Penegak Hukum, yaitu agar dapat lebih profesional dengan memahami teori hukum secara keseluruhan serta gejala-gejala sosial yang terjadi pada masyarakat sehingga tidak melakukan

kesalahan dalam penyelesaian sengketa maupun penerapan hukum dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.

- b. Manfaat bagi Masyarakat, yaitu memberikan kesadaran pada masyarakat pentingnya mempelajari dan mengerti tentang hukum serta penegak hukum agar dapat lebih berhati-hati dalam bertindak.
- c. Manfaat bagi Penulis yaitu menambah wawasan dan memahami bahwa penerapan hukum secara teori tidak sepenuhnya dapat diwujudkan pada praktek hukum.

E. Keaslian Penelitian

Karya penulisan yang berjudul *Pertimbangan Penegak Hukum pada Penerapan Pasal 378 KUHP dalam kasus Wanprestasi tentang Perjanjian Utang-Piutang* ini merupakan hasil karya asli yang dikaji dan diteliti oleh penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini yaitu mengenai dasar pertimbangan penegak hukum menerapkan Pasal 378 KUHP dalam kasus wanprestasi tentang perjanjian utang-piutang. Letak perbedaan yang terdapat dalam karya penulisan ini dengan karya penulisan yang lain dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yaitu:

1. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Pinjam Meminjam Uang dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Antara PT. Madu Baru dengan Petani Tebu, yang disusun oleh Fitri Hertati Simatupang, NPM: 060509349.

- a. Tujuan Penelitian berdasarkan Rumusan Masalah yang dibahas dalam karya penulisan ini yaitu untuk mengetahui penyelesaian masalah (wanprestasi) dalam perjanjian kemitraan pinjaman uang dengan jaminan hak tanggungan atas tanah yang tidak didaftarkan di PT. Madu Baru Yogyakarta
 - b. Hasil penelitian yang diperoleh adalah penyelesaian yang dilakukan PT. Madu Baru Yogyakarta dalam mengatasi debitur wanprestasi tidak melalui jalur hukum (pengadilan), tetapi melalui pendekatan kekeluargaan.
2. Upaya hukum para pihak akibat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di *Distro Slackers*, yang disusun oleh Ricky Nicolas Siahaan, NPM: 080509972.
- a. Tujuan Penelitian berdasarkan Rumusan Masalah yang dibahas dalam karya penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang ditempuh para pihak akibat wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di *Distro Slackers*.
 - b. Hasil penelitian yang diperoleh adalah upaya hukum yang ditempuh para pihak akibat wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di *Distro Slackers* dengan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mufakat dengan cara bernegosiasi, dan menetapkan sejumlah ganti kerugian yang dibayarkan pada saat itu juga.

3. Upaya Penyidik dalam Mencari Alat Bukti Tindak Pidana Penipuan Via SMS (*Short Message Service*) berdasarkan KUHAP, yang disusun oleh Komang Ardiana, NPM: 060509287.
 - a. Tujuan Penelitian berdasarkan Rumusan Masalah yang dibahas dalam karya penulisan ini yaitu untuk mengetahui upaya penyidik dalam mencari alat bukti yang diatur oleh KUHAP dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan via SMS (*Short Message Service*)
 - b. Hasil penelitian yang diperoleh adalah upaya penyidik dalam mencari alat bukti yang diatur oleh KUHAP dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan via SMS (*Short Message Service*) dengan aturan hukum pidana Pasal 184 KUHAP tetapi konsekuensi hukum yang diberlakukan terhadap para pelaku tindak pidana penipuan via SMS telepon seluler yaitu dapat dipidana berdasarkan ketentuan pada Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun.

F. Batasan Konsep

1. Penegak Hukum yakni pihak–pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.⁷
2. Penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

⁷ Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

3. Wanprestasi adalah prestasi yang buruk, perbuatan yang buruk, tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan yang telah ditetapkan dalam perikatan.⁸
4. Perjanjian utang piutang adalah perjanjian pinjam meminjam yang berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdara, pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

G. Metode Penelitian

Jenis Metode Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang berupa:

- 1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ M. Zen Abdullah, *Op. Cit.*, hlm.157.

- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh dari putusan pengadilan dan putusan hakim mahkamah agung, buku-buku, pendapat hukum, internet, dan hasil penelitian.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Wawancara dengan Bapak Kennedy Sinaga, SH di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Ibu Nur Aeni Burhanuddin, SH di Kejaksaan Negeri Balikpapan, dan Bapak Gede Ariawan, SH., M.H di Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Narasumber.

3. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya peneliti menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dengan nara sumber dan dari bahan hukum sekunder, dengan memanfaatkan bahan hukum primer sebagai bahan penjas, dan disimpulkan secara deduktif.

H. Sistematika Skripsi

Rencana isi skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian

H. Sistematika Skripsi

BAB II : PENERAPAN PASAL 378 KUHP TERHADAP KASUS WANPRESTASI

- A. Tinjauan Umum tentang Perkara Pidana Penipuan
 - 1. Tinjauan tentang Pidana
 - a. Pengertian Hukum Pidana dan Pidana
 - b. Asas-asas Hukum Pidana

c. Unsur-unsur Perbuatan Pidana

2. Tinjauan tentang Penipuan

a. Pengertian Penipuan

b. Unsur Penipuan Berdasarkan Pasal 378 KUHP

B. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi pada Perjanjian Utang Piutang

1. Tinjauan tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

b. Syarat-syarat Sah Perjanjian

c. Asas-asas Perjanjian

d. Unsur-unsur Perjanjian

2. Tinjauan tentang Wanprestasi pada Perjanjian Utang Piutang

a. Pengertian Wanprestasi dan Perjanjian Utang Piutang

b. Pembatalan Perjanjian karena penipuan

C. Penerapan Pasal 378 KUHP terhadap kasus Wanprestasi

1. Pertimbangan Polisi Menerapkan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang

2. Pertimbangan Jaksa Menerapkan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang

3. Pertimbangan Hakim Menerapkan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran